

## PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SAMBAS

**Fajar Anggasuta**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail :fajar\_benzema@yahoo.com

### **Abstrak**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pengelolaan dan permasalahan dalam retribusi terminal di Kabupaten Sambas. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam penerimaan target realisasi retribusi terminal di Kabupaten Sambas pada tahun 2012 yang tidak mencapai target dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan lebih bermakna sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya atas fenomena yang sedang terjadi di masyarakat guna mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa mempersoalkan perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain atas fenomena penelitian dan kenyataan sosial. Dalam penelitian ini hanya ada satu variabel yang peneliti fokuskan yaitu proses pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas, sehingga diharapkan peneliti dapat menemukan permasalahan yang sebenarnya dalam proses pengelolaan retribusi terminal selama ini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapatnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, seperti jumlah petugas yang sangat mini, kurangnya kesadaran dari para supir angkutan umum akan kewajiban membayar retribusi, dan fasilitas terminal yang kurang memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan retribusi terminal tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sehingga diharapkan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan retribusi terminal untuk memberikan kontribusi maksimal agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai harapan.

Kata kunci: Pengelolaan, Retribusi Terminal, Koordinasi, Fasilitas.

### **Abstract**

This thesis is intended to find problems in the process management and problems of terminal charges in Sambas District. The title of this thesis was appointed by the problems that occur in the realization of the target receiving terminal in Sambas district levy in 2012 that did not hit the target as compared to previous years. This study used a qualitative approach in the hope that the data obtained more complete, thorough, credible, and more meaningful so that what is to be achieved in this study in accordance with the research objectives. This type of research is descriptive research that is intended to describe the actual state of the phenomenon that is happening in the community to determine the value of an independent variable, either a variable or more, regardless of the comparison or connection between one variable and the other variables on the phenomenon of research and social reality. In this study there is only one variable that researchers focus on the process of management of terminal charges in Sambas District, so the researchers expected to find the real problems in the management process for this terminal retribution. The conclusion of this study is that there are some problems in the implementation of fee collection terminal, such as a very minimal amount of personnel, lack of awareness of the public transport drivers of their obligation to pay the levy, and inadequate terminal facilities that led to the implementation of fee collection terminal can not be made maximally. So expect to all elements involved in the management of terminal charges to make the maximum contribution that those objectives can be achieved as expected.

Keywords: Management, Terminal Charges, Coordination, Facilities.

**Fajar Anggasuta**

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Page 254

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan paragraf kedua pasal 157 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber PAD, antara lain:

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah;

PAD salah satunya bersumber dari sektor retribusi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Prakosa, 2005:92), Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dalam berbagai aspek pendapatan asli daerah (PAD), terdapat salah satu penerimaan yaitu bersumber dari retribusi daerah yang diantaranya terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah retribusi

terminal. Retribusi terminal itu sendiri termasuk ke dalam retribusi jasa usaha. Ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan retribusi terminal tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan daerah dari penerimaan retribusi terminal.

Belum tercapainya target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi terminal, sarana dan prasarana terminal yang ada di Kabupaten Sambas hingga saat ini memprihatinkan dengan kondisi bangunan-bangunan yang sangat kumuh dan tidak dikelola dengan baik. Jumlah terminal di Kabupaten Sambas terdiri dari 4 (empat) terminal yakni Terminal Pemangkat, Terminal Tebas, Terminal Sambas, dan Terminal Kartiasa. Kesadaran para supir angkutan umum dalam membayar retribusi juga tergolong rendah, karena tidak sedikit supir yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban membayar retribusi tersebut. Dari seluruh terminal angkutan umum yang terdapat di Kabupaten Sambas tidak ada satupun terminal yang dikelola dengan baik terutama infrastruktur terminal dengan kondisi penataan bangunan-bangunan tempat peristirahatan di sekitar terminal dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Mengingat bahwa retribusi terminal merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sambas yang dapat dikelola untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Sambas”.

## 2. Rumusan Permasalahan

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam merumuskan fakta dan datanya, maka saya merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Sambas ?”.

## 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimanaproses perencanaan (*planning*) dalam pengelolaan retribusiterminalsebagai upaya peningkatan penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Sa mbas.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimanaproses pengorganisasian (*organizing*) dalam pengelolaan retribusiterminalsebagai upaya peningkatan penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimanaproses penggerakkan (*actuating*) dalam pengelolaan retribusiterminalsebagai upaya peningkatan penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Sa mbas.
4. Untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimanaproses pengawasan (*controlling*) dalam pengelolaan retribusiterminalsebagai upaya peningkatan penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas.

## 4. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan

kontribusi pemikiran terhadap kinerja kelembagaan dalam perspektif administrasi publik dan agar dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut pada masalah yang sama dengan kajian yang lebih detail dan mendalam.

Manfaat praktis, dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam menanggulangi semua permasalahan yang terjadi dalam mengelolaretribusi terminal serta dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi sebenarnya mengenai retribusi terminal.

## B. TEORI DAN METODE PENELITIAN

### 1. Teori

Wardoyo (dalam Putra, 2011) mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasandalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Harsoyo (dalam Putra, 2011), pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan pengertian pengelolaan yang telah dijelaskan sebelumnya, terkandung fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R.Terry yang terdiri dari

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Sehingga dalam penjelasan teoritis tentang pengelolaan, penulis akan mengaitkan pengelolaan dengan fungsi-fungsi manajemen.

a. Perencanaan

Menurut Stoner perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Sedangkan G.R.Terry menjelaskan perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Brantas, 2009:56).

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. G.R.Terry memberikan pengertian mengenai pengorganisasian sebagai berikut: (a) Pengorganisasian dalam pengertian real (*real sense*) menunjukkan hubungan antara manusia sebagai akibat organisasi; dan (b) Pengorganisasian dalam pengertian abstrak menunjukkan hubungan antara unit-unit atau departemen-departemen kerja (Hasibuan, 1993:122).

c. Penggerakkan (*actuating*)

G.R.Terry (Brantas, 2009:95) memberikan definisi penggerakkan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai

dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Koontz dan O'Donnel (dalam Hasibuan, 1993:177) mendefinisikan penggerakkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

d. Pengawasan/Pengendalian (*controlling*)

G.R.Terry merumuskan pengawasan (*controlling*) sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (Brantas, 2009:189). Tujuan pengendalian/pengawasan adalah agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan (Hasibuan, 1993:223). Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisis kembali, apakah sudah benar-benar realistis atau tidak. Jika belum benar atau realistis maka rencana tersebut perlu diperbaiki.

e. Pengelolaan Retribusi Terminal

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang dimaksud dengan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan angkutan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, pasal 29, disebutkan bahwa struktur retribusi terminal terdiri dari:

- a. Jasa tempat parkir;
- b. Jasa tempat kegiatan usaha;
- c. Pengguna kios/toko; dan
- d. Pengguna kamar mandi/wc.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, pasal 25, objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam pasal 26, subjek retribusi terminal adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan terminal.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, pasal 85 ayat (1), dijelaskan bahwa "Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi." Dalam ketentuan ini jelas Bupati memiliki wewenang untuk melakukan proses pengawasan retribusi daerah termasuk retribusi terminal. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan

pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Terminal Sambas. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan Teknis Bidang Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, Kepala UPT Terminal Sambas, pengguna jasa terminal, serta supir angkutan umum. Selanjutnya, yang menjadi objek penelitian pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber serta melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perencanaan (*planning*)

Hasil wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan telah berlangsung sebagaimana mestinya, meskipun masih ada hal-hal yang perlu ditinjau ulang terutama mengenai keterlibatan pihak pengelola terminal di tiap kecamatan di kabupaten Sambas. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diharapkan seperti keterbatasan petugas, fasilitas terminal yang belum sesuai standar, dan lain-lain. Penetapan target realisasi dalam retribusi terminal di Kabupaten Sambas tidak ditetapkan secara sepihak oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas melainkan merupakan penetapan target yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam

pengelolaan retribusi terminal guna pencapaian atau peningkatan penerimaan daerah yang mana retribusi terminal termasuk dalam salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengalokasian wewenang merupakan ketentuan yang diatur dalam tiap instansi yang berwenang dalam pengelolaan retribusi. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas dalam proses pengelolaan retribusi terminal dan lain-lain. *Staffing, Delegation of Authority*, Departemenisasi, dan Personalia sudah diatur secara jelas dalam penjelasan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas di Bidang Retribusi Daerah termasuk untuk pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas sendiri.

## 3. Penggerakkan (*actuating*)

Sebagai salah satu unsur dari perangkat daerah, keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas sangat diperlukan dan mempunyai peran yang sangat penting dan mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta sebagai upaya untuk mengakomodir berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di bidang pendapatan daerah termasuk pengelolaan retribusi terminal. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas sebagai koordinator

bidang pendapatan daerah, mengkoordinir dan memotivasi kegiatan-kegiatan dari unit-unit kerja pengelola pendapatan daerah lainnya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam proses pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sambas dapat diketahui bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan terutama mengenai keterbatasan petugas di lapangan, fasilitas yang kurang mendukung dan lain sebagainya. Diharapkan segala sesuatu yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di tiap kecamatan di Kabupaten Sambas bisa menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Sambas agar permasalahan ini tidak berlangsung secara terus menerus sehingga pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas bisa berlangsung lebih baik.

## 4. Pengawasan / Penge dalian (*controlling*)

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Teknis Bidang Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas sebelumnya dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan retribusi daerah terasuklah di dalamnya retribusi terminal yaitu antara lain: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas (Dispenda); Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas (Dishubkominfo); dan Inspektorat Kabupaten Sambas. Tujuan pengendalian/pengawasan adalah agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan

supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan (Hasibuan, 1993:223). Dalam proses pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas, Kepala Seksi Pembinaan Teknis Bidang Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas mengungkapkan bahwa persoalan mendasar yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan retribusi terminal adalah terletak pada proses pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh beberapa supir angkutan umum baik itu mobil penumpang maupun mobil barang dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan utama yang harus segera dibenahi adalah tentang keberadaan para pemungut liar yang selalu mengkhawatirkan para supir mobil angkutan umum. Selain itu kurangnya kesadaran dari para supir angkutan umum akan keharusan membayar retribusi turut menjadi permasalahan yang selama ini terjadi sehingga pemungutan retribusi terminal tidak dapat terlaksana secara maksimal.

#### D. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan dalam pengelolaan retribusi terminal melibatkan pihak-pihak yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas (Dispenda) selaku pihak yang menetapkan target yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi terminal, kemudian Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas (Dishubkominfo) selaku pelaksana pemungutan retribusi terminal di lapangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas (Bappeda) selaku penyedia anggaran APBD yang ditindaklanjuti oleh TAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah).

2. Penetapan target realisasi dalam retribusi terminal di Kabupaten Sambas tidak ditetapkan secara sepihak oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas melainkan merupakan penetapan target yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam pengelolaan retribusi terminal guna pencapaian atau peningkatan penerimaan daerah yang mana retribusi terminal termasuk dalam salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas.

3. Pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas telah diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Jadi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas dalam menjalankan tugasnya mengacu pada peraturan tersebut. Sedangkan untuk petugas di lapangan saat melakukan pemungutan retribusi terminal telah diatur dalam ketentuan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas beserta Unit

Pelaksana Teknis (UPT) di tiap kecamatan.

4. Dalam melaksanakan pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas mengalami hambatan dalam mencapai target realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi terminal. Meskipun segala sesuatunya telah direncanakan secara matang dalam pengelolaan retribusi terminal tetap saja dihadapi beberapa hambatan atau permasalahan ketika pelaksanaan pemungutan retribusi berlangsung, seperti jumlah pet gas yang sangat minim, kurangnya kesadaran dari para supir angkutan umum akan kewajiban membayar retribusi, dan fasilitas terminal yang kurang memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan retribusi terminal tidak bisa dilakukan secara maksimal.
5. Dalam proses pengawasan retribusi terminal adapun instansi yang terlibat antara lain Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas (Dispenda) selaku pengendalian operasional yang melakukan pengecekan melalui media karcis. Sehingga pengecekan dapat dilakukan secara jelas, Inspektorat selaku pengawas terhadap instansi pelaksana, dan secara internal pengawasan juga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas (Dishubkominfo).

## 2. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut:

1. Kurang terbukanya informan yang menyebabkan informasi yang diperoleh oleh peneliti tidak menyeluruh (holistik) sehingga banyak informasi yang belum peneliti dapatkan dalam penelitian yang dilaksanakan.
2. Kurangnya data yang dimiliki oleh instansi yang terlibat dalam proses pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sambas menyebabkan peneliti kesulitan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## E. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran, seluruh pengasuh, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas beserta jajaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas beserta jajaran, Kepala UPT Kecamatan Sambas, serta para supir angkutan umum dan pengguna jasa Terminal Sambas yang terlibat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Harmono. 2011. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1993. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pembangunan Sambas, 2012. *Kontribusi PAD Untuk Pembangunan Sambas*. Sambas: Humas Sambas.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Labolo, Muhadam, dkk. 2008. *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Jawa Timur: Bayumedia.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wastistono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

### Peraturan Perundang-Undangan/Dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Kalimantan Barat, 2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 11.
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FAJAR ANGGASUTA  
NIM / Periode lulus : E42009004 / 2013  
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [fajar\\_benzema@ynhoo.com](mailto:fajar_benzema@ynhoo.com) / 085245158722

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SAMBAS**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal Prodi IP



Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 5 Februari 2014

(FAJAR ANGGASUTA)